



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA  
TAHUN 2016 - 2021**

## BERITA ACARA

### HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA TAHUN 2016-2021

Pada hari Jum'at tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Aula Ruang Rapat Pemerintah Kota Balikpapan telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan rancangan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan program pembangunan daerah yang diterapkan dalam RPJM Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.
2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
3. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Utara, telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Hasil Verifikasi,  
Camat Balikpapan Utara,

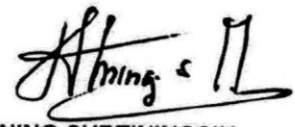
  
Drs. SAYID MUHDAR

Balikpapan, 13 Januari 2017

Ketua Tim Verifikasi,  
Bidang Kesejahteraan dan Aparatur,

  
MURNI

Mengetahui,  
Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan,

  
NINING SURTINGSIH

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2025 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun ke depan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Balikpapan.

Balikpapan, 12 Januari 2017  
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

TTD

**Drs. SAYID MUHDAR**

## DAFTAR ISI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA .....	11
2.1 Keadaan Geografi dan Demografi .....	11
2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara.....	16
2.3 Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Utara.....	27
2.4 Sarana dan Prasarana .....	29
2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.....	32
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara .....	32
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Balikpapan .....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	56
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	59
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara.....	59
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Utara .....	62
4.3 Strategi.....	64
4.4 Kebijakan .....	66
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	68
5.1 Program dan Kegiatan .....	68
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	95
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 harus selaras / konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara disusun guna memberikan masukan / saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

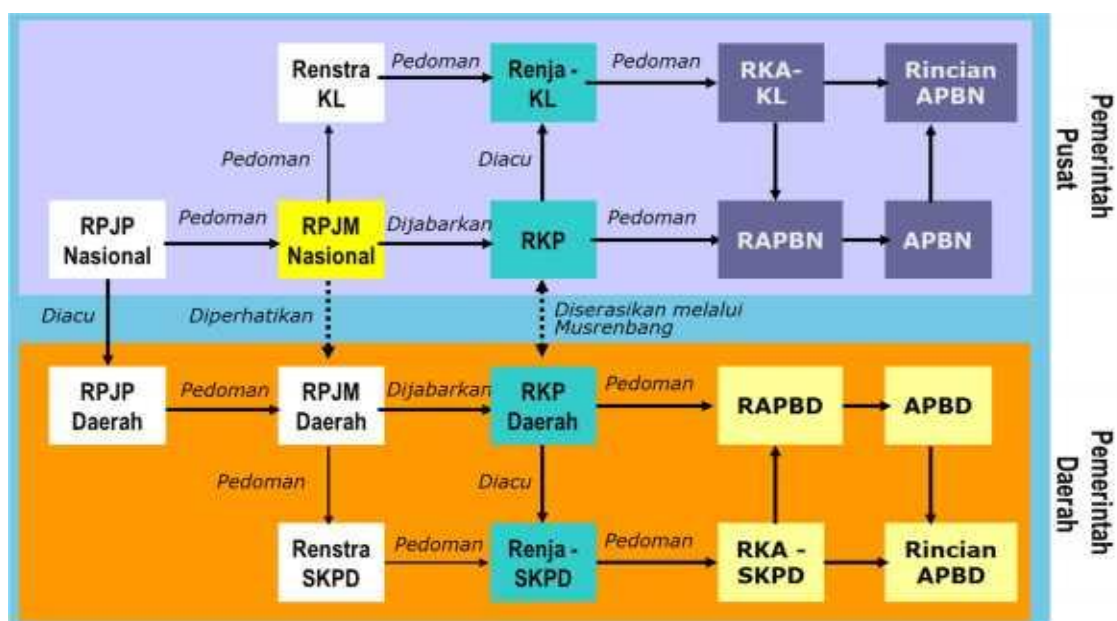
Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk

menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan utara untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Gambar 1.1



#### Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;

3. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
4. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan.

**Tabel 1.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan Tahun 2016-2021**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman	Misi ke-5 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan ke-8 : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	Sasaran ke-10 : Tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai SKPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Utara berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, disamping itu Kecamatan Balikpapan Utara terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kecamatan Balikpapan Utara.

Upaya tersebut direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat serta kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 disusun atas dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 15) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;



- 16) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;
- 17) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara.
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Balikpapan Utara ini meliputi beberapa bagian, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan Latar Belakang dan keterkaitan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara dengan RPJMD Kota Balikpapan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

Dalam bab ini menjelaskan Keadaan Geografi dan Demografi, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara, Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Utara, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.

#### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu – Isu Strategis.

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam bab ini menjelaskan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Utara, Strategi, serta Kebijakan.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam bab ini menjelaskan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam bab ini menjelaskan Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

#### 2.1 Keadaan Geografi dan Demografi

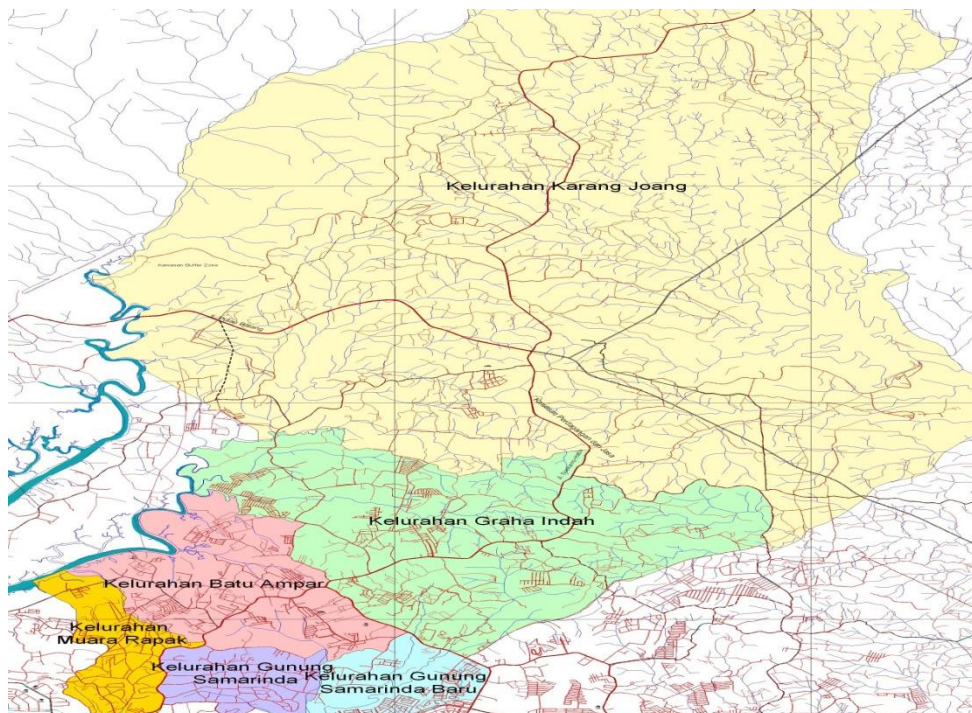
##### 2.1.1 Keadaan Geografi

Berdasarkan data, secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km<sup>2</sup> dengan ketinggian air laut berkisar dari 0-25 meter.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Timur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah

Kecamatan ini memiliki 6 Kelurahan, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Muara Rapak
2. Kelurahan Gunung Samarinda
3. Kelurahan Gunung Samarinda Baru
4. Kelurahan Batu Ampar
5. Kelurahan Graha Indah
6. Kelurahan Karang Joang



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Balikpapan Utara

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Utara Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Balikpapan Utara berjumlah ± 162.168 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 84.256 jiwa dan Perempuan berjumlah 77.098 jiwa.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 2 (dua) Rumah Sakit, Puskesmas sebanyak 3 (tiga) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah, Posyandu 132 buah, Klinik 1 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sembako di Kecamatan Balikpapan Utara Terdapat Pasar Tradisional sebanyak 2 (dua) buah, Pasar Modern (Supermarket, Swalayan, dll) sebanyak 10 (Sepuluh) buah dan Pasar-pasar musiman sebanyak 10 (sepuluh) buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Balikpapan Utara, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara.

### 2.1.2 Peta Rawan Bencana

No.	Jenis Rawan Bencana	Lokasi Rawan Bencana
1.	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muara Rapak : -</li> <li>- Gn. Samarinda : -</li> <li>- Gn. Samarinda Baru : -</li> <li>- Batu Ampar : -</li> <li>- Graha Indah : -</li> <li>- Karang Joang : -</li> </ul>
2.	Longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muara Rapak : -</li> <li>- Gn. Samarinda : -</li> <li>- Gn. Samarinda Baru : RT 1, RT 2, RT 4, RT 6, RT 15, RT 10</li> <li>- Batu Ampar : -</li> <li>- Graha Indah : -</li> <li>- Karang Joang : RT 9, RT 52, RT 7, RT 6, RT 60, RT 5, RT 12, RT 13, RT 57, RT 14, RT 15, RT 39, RT 37, RT 48</li> </ul>

### 2.1.3 Potensi Wilayah

1. Pariwisata
2. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)
3. Peternakan
4. Perkebunan
5. Perikanan dan minapolitan
6. Kawasan lindung (hutan lindung, bufferzone hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan waduk dan embung, kawasan mangrove)
7. Industri
8. Perumahan
9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

### 2.1.4 Demografi

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2016**

No	Kel. Umur	Muara Rapak	Gn. Samarinda	Gn. Samarinda Baru	Batu Ampar	Graha Indah	Karang Joang	Jumlah
1	00-04	2.890	2.031	944	3.177	3.295	2.088	14.425
2	05-09	3.212	2.279	1.116	3.536	4.024	2.441	16.608
3	10-14	2.857	2.042	1.070	3.136	3.652	2.260	15.017
4	15-19	2.681	1.868	851	2.862	3.328	2.173	13.763
5	20-24	2.850	1.836	695	3.048	3.184	2.177	13.790
6	25-29	2.962	2.155	833	3.212	3.157	2.124	14.443
7	30-34	3.470	2.459	1.054	3.729	3.714	2.366	16.792
8	35-39	3.408	2.248	1.215	3.774	3.566	2.298	16.509
9	40-44	2.793	2.045	1.088	2.890	3.385	1.976	14.168
10	45-49	2.168	1.555	729	2.472	2.590	1.613	11.127
11	50-54	1.900	1.382	557	1.874	1.876	1.319	8.908
12	55-59	1.597	1.068	409	1.415	1.194	976	6.659
13	60-64	1.222	818	298	1.008	697	621	4.664
14	65-69	623	438	165	511	383	338	2.458
15	>=70	720	387	114	417	407	547	2.592
Jumlah		35.353	24.611	11.138	37.061	38.425	25.308	171.923

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.2

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Muara Rapak	Gn. Samarinda	Gn. Samarinda Baru	Batu Ampar	Graha Indah	Karang Joang	Jumlah
1	Laki-laki	18.231	12.706	5.659	19.227	20.115	13.294	89.232
2	Perempuan	17.122	11.905	5.479	17.834	18.337	12.014	82.691
	Jumlah	35.353	24.611	11.138	37.061	38.452	25.308	171.923

Tabel 2.3

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Muara Rapak	Gn. Samarinda	Gn. Samarinda Baru	Batu Ampar	Graha Indah	Karang Joang	Jumlah
1	Belum Sekolah	7.372	5.029	2.445	8.038	9.151	6.216	38.251
2	Belum Tamat SD	2.685	1.904	871	2.904	3.193	2.109	13.666
3	Tamat SD	4.974	3.297	1.046	4.846	5.338	6.079	25.580
4	SMP	4.749	3.178	990	4.881	4.956	4.068	22.822
5	SMA	11.985	8.159	2.877	12.015	11.986	5.885	52.907
6	DIPLOMA I / II	40	56	28	32	55	24	235
7	DIPLOMA III	1.140	884	573	1.209	1.140	323	5.269
8	S-I	2.314	2.024	2.157	3.011	2.534	578	12.618
9	S-II	90	77	149	123	98	25	562
10	S-III	4	3	2	2	1	1	13
	Jumlah	35.353	24.611	11.138	37.061	38.452	25.308	171.923

Tabel 2.4

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2016

No	Pekerjaan	Muara Rapak	Gn. Samarinda	Gn. Samarinda Baru	Batu Ampar	Graha Indah	Karang Joang	Jumlah
1	Belum Bekerja	16.923	10.750	4.629	16.741	17.744	12.717	78.974
2	Pelajar / Mahasiswa	6.589	4.817	2.248	7.117	7.771	4.673	33.215
3	Pensiun	333	291	112	315	294	76	1.421

No	Pekerjaan	Muara Rapak	Gn. Samarinda	Gn. Samarinda Baru	Batu Ampar	Graha Indah	Karang Joang	Jumlah
4	PNS	386	384	272	596	668	184	2.490
5	TNI/POLRI	188	149	68	679	508	133	1.725
6	Pedagang	551	308	78	427	376	216	1.956
7	Karyawan	7.149	5.212	2.721	7.135	6.792	2.915	31.924
8	Petani	38	58	16	103	351	1.633	2.199
9	Buruh	1.516	1.028	192	1.275	1.494	1.327	6.832
10	Tukang	77	39	14	81	69	52	332
11	Edukasi	295	296	97	366	398	198	1.650
12	Profesi	158	100	39	172	160	116	745
13	Medis	111	117	108	149	131	44	660
14	Lain-lain	1.569	1.062	544	1.905	1.696	1.024	7.800
Jumlah		35.353	24.611	11.138	37.061	38.452	25.308	171.923

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2016**

No	Agama	Muara Rapak	Gn. Samarinda	Gn. Samarinda Baru	Batu Ampar	Graha Indah	Karang Joang	Jumlah
1	Islam	32.278	23.392	8.946	33.201	35.420	23.651	156.888
2	Kristen	2.247	802	1.306	3.013	2.146	927	10.441
3	Katholik	417	303	514	673	632	665	3.204
4	Hindu	67	33	64	39	159	32	394
5	Budha	344	81	308	135	95	33	996
6	Konghucu	0	0	0	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		35.353	24.611	11.138	37.061	38.452	25.308	171.923

## **2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara**

### **2.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi**

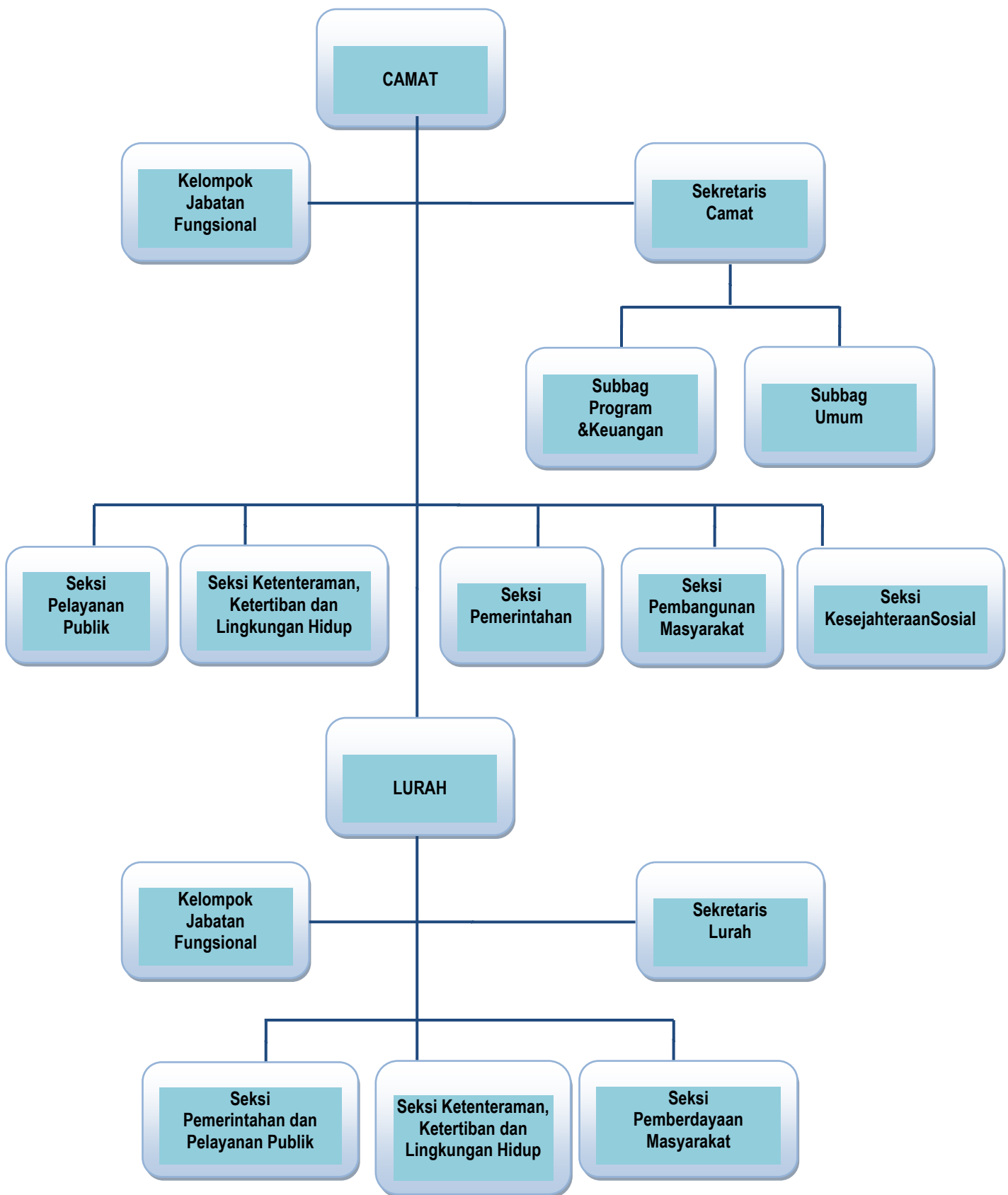
Kecamatan Balikpapan Utara, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Utara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas Camat dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



## 1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. Penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Rumah tangga kantor;
- e. Perlengkapan;
- f. Protokol;
- g. Hubungan masyarakat;
- h. Kearsipan;
- i. Surat menyurat; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolanan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1) Subbagian Umum**

Subbagian umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2) Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana strategis;
  - 2. Rencana kerja;
  - 3. Rencana kerja tahunan;
  - 4. Penetapan kinerja; dan
  - 5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- f. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- i. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;\
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pembangunan Masyarakat**

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;\
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. Seksi Pelayanan Publik**

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Penyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyusun Standar Pelayanan;
- f. Penyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- g. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- h. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- i. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
- j. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- k. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

- o. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8. Lurah

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam Pasal 17, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyenggarakan pelayanan masyarakat;
- d. Menyenggarakan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyenggarakan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- h. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 9. Sekretaris Lurah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana strategis;
  - 2. Rencana kerja;
  - 3. Rencana kerja tahunan;
  - 4. Penetapan kinerja; dan
  - 5. Laporan kinerja;

- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **10. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;



- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **11. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;

- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.3 Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber Daya SKPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya SKPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya SKPD yang dimilikinya.

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Desember 2017 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 6 (enam) orang Sekretaris Kelurahan, 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 38 (tiga puluh delapan) orang staf PNS dan 47 (empat puluh tujuh) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara.. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**

**Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	IV		III		II		I		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Utara	1	-	6	4	4	4	1	-	12	8
Kelurahan Muara rapak	-	-	3	3	-	2	1	-	4	5
Kelurahan Gunung Samarinda	-	-	4	1	2	1	1	-	7	2
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	-	4	2	-	1	1	-	5	3
Kelurahan Batu Ampar	-	-	3	4	1	1	1	-	5	5
Kelurahan Graha Indah	-	-	3	3	2	1	2	-	7	4
Kelurahan Karang Joang	-	-	4	1	2	2	1	-	7	3

Tabel 2.7

## Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Eselon Kecamatan Balikpapan Utara

Tingkat	IIIA		IIIB		IVA		IVB		Non Eselon		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Utara	1	-	1	-	4	1	-	2	1	-	7	3
Kelurahan Muara rapak	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	3	3
Kelurahan Gunung Samarinda	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	4	2
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	4	2
Kelurahan Batu Ampar	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	3	3
Kelurahan Graha Indah	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	3	3
Kelurahan Karang Joang	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	4	1

Tabel 2.8

## Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan tingkat Pendidikan Kecamatan Balikpapan Utara

Tingkat	S2		S1		D3		SMA		SMP		SD		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Utara	1	-	2	2	-	1	7	4	-	-	1	-	11	9
Kelurahan Muara rapak	-	-	2	-	-	-	1	5	1	-	-	-	4	5
Kelurahan Gunung Samarinda	-	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	4	1
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	-	2	-	1	1	2	2	-	-	-	-	5	3
Kelurahan Batu Ampar	-	-	2	-	-	-	2	5	1	-	-	-	4	6

Tingkat	S2		S1		D3		SMA		SMP		SD		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kelurahan Graha Indah	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	1	-	7	2
Kelurahan Karang Joang	-	-	2	1	1	-	3	2	1	-	-	-	6	3

## 2.4 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Balikpapan Utara dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut dirincikan sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Utara dengan enam kelurahan yang disajikan dengan nilai barangnya

Tabel 2.9

Sarana prasarana Kecamatan Balikpapan Utara

No	Nama Barang	Jumlah
1	Gedung	15
2	Tugu/Monumen	1
3	AC Split	9
4	AC Unit	12
5	Air Conditioning Unit	11
6	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	2
7	Alat Pemadam Kebakaran	2
8	Alat Pemadam Portable	1
9	Alat Penghancur Kertas	1
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
11	Audio Cassete Recorder	1
12	Band Kas	5
13	Bangku Tunggu	7
14	Buffet Kaca	1
15	Camera + Attachment	2
16	Camera Electronic	3
17	Camera Video	1
18	Chain Saw	2
19	Circuit Closed Television (CCTV)	2
20	CPU	6
21	Digital Camera	7
22	Dispenser	9
23	Electric generating set lainnya	1
24	Facsimile	4
25	Filling Besi/Metal	14
26	Generator	3
27	Gerobak Dorong	7

No	Nama Barang	Jumlah
28	Gerobak Tarik	1
29	Global Positioning System	2
30	gorden	10
31	Handy Cam	6
32	Handy Talky	2
33	Hard Disk	1
34	Jeep	1
35	Kain Panel	4
36	Karpet	2
37	Kasur	2
38	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3
39	Kipas Angin	5
40	Kitchen Set	1
41	Kursi Besi/Metal	4
42	Kursi Biasa	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21
46	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	8
47	Kursi Rapat	6
48	Kursi Tamu	10
49	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1
50	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu / Lobby	2
51	Lap Top	10
52	LCD / Infocus	2
53	Lemari Arsip	9
54	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15
55	Lemari Besi	12
56	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2
57	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	6
58	Lemari Es	6
59	Lemari Kaca	7
60	Lemari Kayu	9
61	Lemari Pakaian	8
62	Lemari Penyimpanan	2
63	Lemari Rias	2
64	Lemari Sorok	1
65	Megaphone	1
66	Meja 1/2 Biro	5
67	Meja Biro	7
68	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17
71	Meja Komputer	2
72	Meja Makan	2
73	Meja Rapat	5
74	Meja Reseption	2
75	Meja Tamu Ruangan Biasa	3
76	Mesin Absen (Time Recorder)	1
77	Mesin Absensi	7
78	Mesin Antrian	1
79	Mesin Cuci	1
80	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	7
81	Mesin Ketik Lain-lain	2

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>
82	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	6
83	Mesin Penghisap Debu	3
84	Mesin Potong Rumput	44
85	Microphone	3
86	Microphone Floor Stand	2
87	Microphone/Wireless Mic	1
88	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2
89	Monitor	2
90	Note Book	8
91	Overhead Projektor	2
92	P.C Unit	63
93	Papan Data	10
94	Papan Nama Instansi	3
95	Papan Pengumuman	26
96	PC Based UV Gel Documentation System	8
97	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1
98	Personal Komputer	10
99	Pesawat Telephone	1
100	Peti Uang	1
101	Portable Generating Set	4
102	Printer	65
103	Proyektor + Attachment	4
104	Rak Piring	1
105	Scanner	1
106	Screen	1
107	Sepeda Motor	30
108	Slide Projector	3
109	Sofa	6
110	Sound System	6
111	Station Wagon	6
112	Tabung Gas	1
113	Tandon Air	1
114	Tangga Alumunium	2
115	Televisi	12
116	Tempat sampah	1
117	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2
118	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3
119	Tripod	1
120	Tustel	1
121	TV Monitor	2
122	Unintemuptible Power Supply (UPS)	29
123	Video Infografic	1
124	Whell Chair	1
125	White Board	2
126	Wireless	3
127	Wireless Amplifier	7

## **2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara Kinerja Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **A. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Kecamatan mencakup pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP, Pernyataan Ahli Waris, Pembuatan Surat Pindah Antar Kecamatan, Surat Kematian dan Rekomendasi Nikah

### **B. Pelayanan IMTN**

Kinerja Pelayanan IMTN yang dilakukan Kecamatan diantaranya : Peninjauan Lokasi atas tanah yang diajukan, membuat gambar bidang tanah, menerbitkan Surat IMTN, dan memfasilitasi jika ada sengketa/permasalahan tanah

### **C. Penerbitan IUMK**

Kinerja Pelayanan IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) yang dilakukan Kecamatan antara lain : memeriksa persyaratan yang diajukan, Peninjauan lokasi tempat usaha yang diajukan, penerbitan Surat IUMK, dan mendata jumlah pengajuan Usaha yang ada di Kecamatan.

## **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Seuai tugas pokok Fungsi kecamatan, mengacu pada Renstra kementerian dalam Negeri yang mempunyai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; maka tantangan yang akan dihadapi oleh kecamatan Balikpapan Utara:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas
3. Sarana dan Prasarana peralatan Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;



7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Utara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Balikpapan Utara terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012-2032, arah potensi pengemabangan kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

1. Perumahan
2. Perdagangan dan jasa
3. Kawasan Ruang terbuka Hijau / Kota
4. Kawasan Industri Sedang Kariangau
5. Kawasan waduk dan embung
6. Kawasan Hutan lindung dan Bufferzone Hitung Lindung

7. Kawasan Mangrove

8. Kawasan pendidikan Tinggi Institute Teknologi Kalimantan

Untuk mendukung pengembangan perumahan maka arah pelayanan pengembangan adalah fasilitasi legalitas lahan (IMTN); Dalam rangka pengembangan perdagangan dan jasa maka kecamatan di tuntut meningkatkan pelayanan (IUMK); Untuk mendukung pengembangan kecamatan sebagai kawasan ruang terbuka hijau maka kecamatan harus mendukung pengamanan hutan kota yang ada di kelurahan Karang Joang dan Gunung Samarinda Baru

Berdasarkan kajian Lingkungan Hidup strategi maka tugas dan fungsi kecamatan Balikpapan Utara adalah mendukung program kota Balikpapan dalam rangka penanganan isu pembangunan berkelanjutan yaitu :

Pencapaian target universal akses tahun 2019 ( 100-0-100)	Fasilitasi pencapaian target di kelurahan Muara Rapak yaitu RT 88 dan 27
Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan 12 tahun	Mendukung pencapaian penurunan angka putus sekolah
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Fasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan sarana transportasi fasilitasi Percepatan pembangunan
Pembangunan kawasan industri kecil menengah dan besar	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan \ fasilitasi percepatan pelaksanaan sarana perdagangan
Penanganan Kebencanaan	fasilitasi percepatan penanganan penanggulangan kebencanaan
Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	Fasilitasi percepatan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata

pengembangan perumahan	Fasilitasi Pengembangan Perumahan
Penanganan pengangguran dan korban PHK	Fasilitasi penanganan pengangguran dan korban PHK
Peningkatan pelayanan Kesehatan	fasilitasi pelayanan kesehatan terutama masyarakat kurang mampu
Peningkatan pelayanan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi Peningkatan pelayanan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

## **BAB III**

### **ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Dalam RPJMD 2016-2021 Kota Balikpapan telah diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi dalam lima tahun ke depan dengan dengan isu strategis yang didasarkan pada permasalahan tersebut.

Adapun Isu strategis RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city)
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Isu Strategis yang dirumuskan tersebut secara umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan adalah Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selaras juga dengan agenda prioritas NAWACITA ke-2 yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Utara 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut Kasi di Kecamatan antara lain:

**Tabel 3.1.1**

**Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi**

TUPOKSI	PERMASALAHAN
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan terutama sarana dan prasarana serta sistem pengarsipan</li> </ul>
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.</li> </ul>
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban;</li> <li>• Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.</li> </ul>
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah.</li> </ul>
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;</li> <li>• Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.</li> </ul>

TUPOKSI	PERMASALAHAN
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.	-
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.	-
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.	-
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan.	Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana.
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan.	Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN.
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.	Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	Masih rendahnya kualitas sumber daya pelaksana.
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	-

Tabel 3.1.2

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Utara terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Utara	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2.	persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
3.	Nilai potensi swadaya masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	-	meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Tabel 3.1.3

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara
			INTERNAL (KEWENANGAN Kecamatan)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN Kecamatan)	
Gambaran Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota	Sesuai Target	SOP	Perwali No. 25 tahun 2016	Dukungan dari seluruh perangkat daerah	Keterbatasan Sarana Prasarana dan SDM
Kajian terhadap Renstra K/L	Mendukung pencapaian target perangkat daerah	SPM	Perwali No. 25 tahun 2016	Dukungan dari seluruh perangkat daerah	Keterbatasan Sarana Prasarana dan SDM
Kajian terhadap RTRW	Mendukung strategi pembangunan	RPJMD	Perwali No. 25 tahun 2016	Dukungan dari seluruh perangkat daerah	Keterbatasan Sarana Prasarana dan SDM
Kajian KLHS	Mendukung penanganan isu strategi pembangunan berkelanjutan	RPJMD	Perwali No. 25 tahun 2016	Dukungan dari seluruh perangkat daerah	Keterbatasan Sarana Prasarana dan SDM

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kota Balikpapan 2005 – 2025 adalah:

**“Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai lima dimensi: jasa, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya dalam bingkai Madinatul Iman”**



Adapun fokus pembangunan jangka menengah ke 3, sesuai RPJPD adalah dibidang jasa, sehingga visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## VISI

***Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman  
Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman***

Visi tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

**KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Utara, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Utara.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

**KOTA NYAMAN DIHUNI** adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)

- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut.
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

**KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN** adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsep *livable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

**MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintah dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 masih melanjutkan, memperkuat dan memantapkan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode sebelumnya, yaitu:

## MISI

- 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;**
- 2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;**
- 3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;**
- 4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;**
- 5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.**

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

**1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;**

Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

**2) Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;**

Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (liveable city) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan ( hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu ( zero waste ) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat ( komunitas hijau ).

**3) Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;**

Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non motorized vehicle) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.

**4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;**

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (green economy) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota

Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**5) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Rumusan misi RPJMD Kota Balikpapan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara adalah :

**MISI 5 “Mewujudkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik”**

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<i>Visi Kota Balikpapan : “Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman.”</i>				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Misi 5:</b></p> <p>Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p><u><b>Penjelasan Misi</b></u></p>	<p><i>Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi</i></p>	<p>Terbentur pada peraturan kementrian terkait recruitmen pegawai</p>	<p>Pemerintah kota mengadakan Bimtek dan Diklat</p>

**Visi Kota Balikpapan : “Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman.”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama	<i>Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan</i>	Keterbatasan Jumlah Anggaran	Adanya bantuan dan partisipasi masyarakat
3	dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat	<i>Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah</i>	Masih rendahnya kesadaran masyarakat	SPGRM
4	penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan <b>meningkatnya</b>	<i>Tingginya permasalahan sosial yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban;</i>	Keterbatasan Tenaga ketentraman dan ketertiban;	Tim Koordinasi Babinsa dan Babinkantibmas
5	<b>kualitas aparatur daerah,</b> yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan	<i>Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.</i>	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Program CGH
6		<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	Kurangnya Sanksi terhadap pelanggaran Perda	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
7		<i>Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang</i>	Keterbatasan dana pemeliharaan	Potensi CSR

**Visi Kota Balikpapan : “Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman.”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<i>belum optimal.</i>		
8		<i>Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat</i>	Keterbatasan SDM penyampaian informasi	Ketersediaan Sarana dan prasarana Penyebaran informasi
9		<i>Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana</i>	Lemahnya penegakan Perda	Penyebar Luasan Informasi Kawasan Rawan Bencana
10		<i>Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN</i>	Kurangnya Sosialisasi pemahaman IMTN kepada masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
11		<i>Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa</i>	Belum adanya aturan teknis	Dukungan peningkatan PAD
12		<i>Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana</i>	Terbentur pada peraturan kementerian terkait recruitmen pegawai	Pemerintah kota mengadakan Bimtek dan Diklat

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kecamatan Balikpapan Utara juga melakukan telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan. Adapun visi Kementerian dalam negeri adalah sebagai berikut :

**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa**

Salah satu misi dalam renstra Kementerian Dalam Negeri yang selaras dengan Kecamatan Balikpapan Utara adalah misi ke-5 yaitu :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik**

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015– 2019 maka Renstra Kecamatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**

#### Tujuan dan Sasaran Pencapaian Renstra

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintahan di daerah perlu didukung peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dengan pemenuhan penyelesaian permasalahan tersebut di atas diharapkan ketercapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

**Tabel 3.3.2**

#### Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

<b>No.</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam	<i>Kurangnya kuantitas dan</i>	Terbentur pada peraturan	Pemerintah kota mengadakan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	penyelenggaraan pembangunan daerah;	<i>kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat</i>	kementrian terkait recruitmen pegawai	Bimtek dan Diklat
		<i>Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan</i>	Keterbatasan Jumlah Anggaran	Adanya bantuan dan partisipasi masyarakat
		<i>Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah</i>	Masih rendahnya kesadaran masyarakat	SPGRM
		<i>Tingginya permasalahan social yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban;</i>	Keterbatasan Tenaga ketentraman dan ketertiban;	Tim Koordinasi Babinsa dan Babinkantibmas
		<i>Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.</i>	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Program CGH
		<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat</i>	Kurangnya Sanksi terhadap pelanggaran Perda	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota



No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<i>tentang Peraturan Daerah;</i>		
		<i>Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.</i>	Keterbatasan dana pemeliharaan	Potensi CSR
		<i>Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat</i>	Keterbatasan SDM penyampaian informasi	Ketersediaan Sarana dan prasarana Penyebaran informasi
		<i>Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana</i>	Lemahnya penegakan Perda	Penyebar Luasan Informasi Kawasan Rawan Bencana
		<i>Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN</i>	Kurangnya Sosialisai pemahaman IMTN kepada masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
		<i>Belum adanya petunjuk teknis</i>	Belum adanya aturan teknis	Dukungan peningkatan PAD

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<i>pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa</i>		
		<i>Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana</i>	Terbentur pada peraturan kementerian terkait recruitmen pegawai	Pemerintah kota mengadakan Bimtek dan Diklat

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Perda No. 12 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

RT RW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan:

Potensi Tata Ruang di Kecamatan Balikpapan Utara :

1. Perumahan
2. Perdagangan dan Jasa
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota
4. Kawasan Industri Sedang Kariangau
5. Kawasan Waduk dan Embung
6. Kawasan Hutan Lindung dan Buffer Zone Hutan Lindung
7. Kawasan Mangrove
8. Kawasan Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Kalimantan

Tabel 3.4.1

## Permasalahan pelayanan RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan pelayanan SKPD	faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perumahan	<i>Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan IMTN</i>	Kurangnya Sosialisai pemahaman IMTN kepada masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
2	Perdagangan dan Jasa	<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	Kurangnya Sosialisasi pemahaman IUMK kepada masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota	<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	Kurangnya Sanksi terhadap pelanggaran Perda	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
4	Kawasan Waduk dan Embung	<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	Kurangnya Sanksi terhadap pelanggaran Perda	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
5	Kawasan Hutan Lindung dan Buffer Zone Hutan Lindung	<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	Kurangnya Sanksi terhadap pelanggaran Perda	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
6	Kawasan industri sedang kariangau	<i>Masih rendahnya kesadaran</i>	Kurangnya Sanksi	Sosialisasi rutin dari

		<i>masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	terhadap pelanggaran Perda	Pemerintah Kota
7	Kawasan Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Kalimantan	Pembebasan lahan yang belum terealisasi semua	Permasalahan lahan	Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan daerah
8	Kawasan Mangrove	<i>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;</i>	Kurangnya Sanksi terhadap pelanggaran Perda	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota

Tabel 3.4.2

**Permasalahan pelayanan kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya**

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Ekonomi</b>	1. Rumah Potong Unggas di KM.13 Kelurahan Karang Joang	Permasalahan Lahan	Sudah adanya Perencanaan
	2. Pengembangan Produksi Air isi ulang Q. BIG di KM.12 Kelurahan Karang Joang	Kurangnya IZin pengolahan	Sosialisasi dan Pembiana
	3. Pengembangan Sentra Buah Naga di Kelurahan Karang joang	Belum berkembangnya cara Pengolahan Produk	Adanya Sosialisasi dan Pembianan
	4. Pengembangan Pepaya Mini KM. 12 Kelurahan Karang Joang (Gapoktan)	Belum berkembangnya cara Pengolahan	Adanya Sosialisasi dan Pembianan

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		Produk	
	5. Pembenahan pada warung-warung di kawasan wisata	Masih rendahnya kesadaran Masyarakat	Sosialisasi dan Pembinaan
<b>Sosial Budaya</b>			
	6. Pertambahan penduduk Kota Balikpapan yang cukup tinggi	Keterampilan dan keterampilan pendatang	Tertib Administrasi Kependudukan
	7. Belum maksimalnya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan	Keakuratan data	Perda No. 8 Tahun 2004 Penanggulangan Kemiskinan
	8. Layanan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih minim	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang layanan Sanitasi	Sosialisasi dan Pembinaan
	9. Pelayanan birokrasi yang cepat dan terbaik untuk masyarakat	Keterbatasan SDM	Rencana pengembangan Smart City
	10. Peran aktif perempuan dalam pembangunan masih kurang	Pola fikir Perempuan	Sosialisasi dan Pembinaan
	11. Peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan Kota Balikpapan masih rendah	Kurangnya Kepedulian	Sosialisasi dan Pembinaan
	12. Minimnya pelayanan dan bantuan dasar untuk anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia.	Keterbatasan Anggaran	Program – Program untuk anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia.
	13. Meningkatkan kualitas pendidikan keluarga	Keterbatasan	Perda No. 8 Tahun 2004

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	miskin melalui beasiswa gakin	Anggaran	Penanggulangan Kemiskinan
	14. Peningkatan pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah cepat dan transparan	Keterbatasan Anggaran	Rencana Pengembangan Smart City
	15. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap PAUD dan non formal	Kurang Pemahaman terhadap Pendidikan non formal	Program 1Kelurahan 1 PAUD dan Program Paket A,B,C
	16. Peningkatan budaya aparatur yang disiplin, berintegritas dan kompeten	Masih adanya Aparatur yang disiplin	Adanya E-Kinerja
	17. Reformasi birokrasi dan peningkatan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel		Pelayanan Satu Pintu
	18. Munculnya permukiman kumuh	Rendah Kesadarannya Masyarakat	Program Kotaku
	19. Jumlah Kawasan Kumuh Kota Balikpapan	Kesadarannya Masyarakat	Program Kotaku
	20. Permukiman Kumuh	Kesadarannya Masyarakat	Program Kotaku
	21. Kebijakan tata ruang yang kurang diketahui oleh masyarakat	Kurangnya sosialisasi	Adanya sosialisasi
	22. Perkembangan lingkungan di sekitar ITK	Sengketa Lahan	Fasilitasi dan Koordinasi
	23. Kekerasan terhadap anak (KDRT)	Kurangnya Kepedulian Kekerasana terhadap layak Anak	Forum Kecamatan layak Anak

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	24. Kerusakan jalan	Rendah Kesadarannya Masyarakat	SPGRM
	25. Kota layak anak	Rendah Kesadarannya Masyarakat	Forum Kecamatan layak Anak
	26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Keterbatasan Anggaran	Perda No. 8 Tahun 2004 Penanggulangan Kemiskinan
	28. Kota ramah lansia	Keterbatasan Anggaran	Perda No. 8 Tahun 2004 Penanggulangan Kemiskinan
	29. Peningkatan Peran Serta Masyarakat di bidang kesehatan	Keterbatasan Anggaran	Perda No. 8 Tahun 2004 Penanggulangan Kemiskinan
	30. Darurat narkoba	Rendah Kesadarannya Masyarakat	Program Bersinar
	31. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Keterbatasan Anggaran	Perda No. 8 Tahun 2004 Penanggulangan Kemiskinan
	32. Pencegahan dan penanganan KTA, KTP, KDRT, dan TPPO	Rendah Kepedulian Masyarakat	Adanya Koordinasi
<b>Lingkungan Hidup</b>	33. Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang berkelanjutan	Kurangnya SDM dan Sarana prasarana Pendukung	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
	34. Perambahan permukiman liar di wilayah hutan kota	Kesadaran Masyarakat	Program kotak
	35. Kerusakan Hutan dan Lahan	Kesadaran Masyarakat	Program kotak
	36. Mangrove Center di Kelurahan Graha Indah		
	37. Penghentian izin galian C untuk sementara	Rendah Kesadarannya	Program

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	sampai batas yang tidak ditentukan	Masyarakat	Bersinar
	38. Tanah Longsor yang umumnya terjadi karena kondisi geografis Kota Balikpapan yang berbukit-bukit kurang lebih 85% dari luas wilayah dan struktur tanah podsolik merah kuning, alluvial & pasir kwarsa yang merupakan jenis tanah mudah terjadi longsor dan curah hujan diatas normal dan cenderung ekstrim	Rendah Kesadarannya Masyarakat	Program Bersinar
	39. banjir karena pembukaan lahan baru untuk permukiman	Rendah Kesadarannya Masyarakat	Program Bersinar

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara dalam 5 tahun ke depan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu permasalahan yang akan dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Secara umum, Isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Utara antara lain:

- a. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima.
- b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
- d. Mengoptimalkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

**Tabel 3.5.1**  
**Skor Kriteria penentuan isu-isu strategis**

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PERANGKAT DAERAH	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20



NO	KRITERIA	BOBOT
4	Mempunyai daya ungkit pembangunan daerah di bidang pelayanan publik	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Perjanjian Kinerja	20
TOTAL		100

Dari Nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut :

**Tabel 3.5.2**  
**Nilai Skala Kriteria**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan pelayanan	5	25	20	15	10	5	80
2	Kelengkapan berkas pengajuan IMTN yang harus dilengkapi	15	15	10	20	10	15	85
3	Ketersediaan informasi pelayanan publik dan pembangunan	10	10	20	10	5	5	60
4	Keterbatasan petugas lapangan untuk menunjang pelayanan publik	10	10	15	5	10	15	65

**Tabel 3.5.3**

**Rata-rata skor isu strategis**

NO	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan pelayanan	80	20
2	Kelengkapan berkas pengajuan IMTN yang harus dilengkapi	85	21,25
3	Ketersediaan informasi pelayanan publik dan pembangunan	60	15
4	Keterbatasan petugas lapangan untuk menunjang pelayanan publik	65	16,25

Setelah dilakukan skor dengan menggunakan skala prioritas maka akan di peringkat sebagai berikut :

**Tabel 3.5.4**  
**Perolehan Peringkat**

No	Isu-Isu strategis	Peringkat
1	Kelengkapan berkas pengajuan IMTN yang harus dilengkapi	I
2	Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan pelayanan	II
3	Keterbatasan petugas lapangan untuk menunjang pelayanan publik	III
4	Ketersediaan informasi pelayanan publik dan pembangunan	IV

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa *kelengkapan berkas pengajuan IMTN* merupakan isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti agar segera dilakukan upaya agar masyarakat memahami dalam melengkapi persyaratan dokumen pembuatan IMTN

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara

##### 4.1.1 Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam menetapkan visi, Kecamatan Balikpapan Utara harus mengacu pada visi Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 :

***“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”***

Visi Kecamatan Balikpapan Utara dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu kondisi ideal Kantor Camat Balikpapan Utara yang diinginkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 adalah:

***“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”***

Penjelasan **Visi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021** adalah sebagai berikut

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
<b><i>“ Menjadikan Kecamatan Balikpapan Utara yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”</i></b>	1. Pelayanan pemerintahan yang berkualitas	Pelayanan pemerintahan yang berkualitas (Good Governance) diartikan sebagai pelayanan yang ramah, memuaskan dan cepat. Penerapan pelayanan yang baik secara konsisten ditandai dengan penyajian informasi yang terbuka dan jelas, kenyamanan sarana prasarana, dan SDM yang melayani secara ramah, profesional dan handal.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	2. Pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan	1. Pembangunan Kecamatan yang terdiri dari enam kelurahan dengan memuat usulan masyarakat untuk pembangunan wilayah secara tepat dan akurat serta meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pemukiman kelurahan baik tenaga, pikiran maupun dana yang terwujud dalam gotong royong masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan hubungan antara aparat dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM penduduk baik melalui pelatihan, sosialisasi dan sebagainya

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Balikpapan Utara, dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan Balikpapan Utara dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya disusun misi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Balikpapan Utara.

#### 4.1.1 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Sebelumnya akan disajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Utara dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 :

Tabel 4.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman di huni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Misi Ke - 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tujuan 8 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	Sasaran 10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. ***Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima;***
2. ***Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.***

Penjelasan misi :

**1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima**

Pelayanan Prima adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terutama penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat sesuai kebutuhan, harapan, dan tuntutan warga negara dan penduduk sebagai pengguna pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan prima akan menghasilkan kepuasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Pelayanan prima tersebut telah diatur dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagai usaha mewujudkan keberhasilan pelayanan, Kecamatan Balikpapan Utara telah menetapkan maklumat pelayanan yaitu maklumat yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.
3. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah diselesaikan.
4. Responsif, lebih mengandung arti daya tanggap dan cepat dalam menghadapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan aspirasi masyarakat yang akan dilayani.
5. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

## **2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban**

Dalam misi ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara lebih terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kecamatan dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Keterlibatan masyarakat juga sesuai dengan nilai gotong-royong bangsa Indonesia yang diharapkan tercapai melalui ide, usulan, keterlibatan fisik dan tenaga serta dana yang dikeluarkan. Selain pembangunan, masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara juga diharapkan partisipasinya dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungannya.

### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Utara**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan melaksanakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan direncanakan dan sesuatu yang akan dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan strategis Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategis, yang harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Balikpapan Utara, ditetapkan Tujuan Strategis Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut :

Tabel 4.2.1

Tujuan, sasaran, indikator dan rumus indikator Kecamatan Balikpapan Utara

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Skor nilai survey Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$
			Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Keluhan Yang diterima}}{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Nilai swadaya masyarakat	Nilai swadaya masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Utara antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Utara juga menentukan sasaran yang akan dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan`	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	- 80,36	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Skor Nilai Kepuasan Masyarakat	79,56	79,76	79,96	80,16	80,36
		- persentase keluhan yang ditindaklanjuti	- 100%		- persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	- Nilai swadaya masyarakat	- 900 Juta	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	- Nilai swadaya masyarakat	300 juta	700 juta	750 juta	800 juta	900 juta

### 4.3 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. *Lingkungan Internal*

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.



**a. Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)**

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi Polsek, TNI, LPM, Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

**b. Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)**

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai

**2. Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

**a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)**

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur;

**b. Faktor Tantangan Organisasi: (threats)**

- 1) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
- 3) Perubahan kondisi perekonomian di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan

Dari penjelasan sebelumnya disusun alternatif strategi yang digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.3**  
**Penentuan strategi Kecamatan Balikpapan Utara**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- IKM  - Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	- Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat  - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor  - Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait  - Membangun sistem layanan pengaduan
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Memperkuat fasilitasi kerjasama dengan lembaga/ormas

**4.4 Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut

**Tabel 4.2.4**  
**Perumusan Kebijakan Kecamatan Balikpapan Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- IKM	- Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat - Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait	1. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan 2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana; 3. Pengembangan data base Kecamatan.
		- Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	- Membangun sistem layanan pengaduan	Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan.
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai swadana masyarakat	Memperkuat fasilitasi kerjasama dengan lembaga/ormas	Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan database Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan, dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, dan kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 5.1 Program dan Kegiatan

Salah satu agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kota Balikpapan adalah melaksanakan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sehingga untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2016-2021 ke dalam program-program prioritas. Pada tahun 2017 program prioritas masih mengikuti renstra yang tahun 2011-2016 dikarenakan pengusulan renja tahun 2017 dilakukan pada awal tahun 2016 sedangkan tahun 2018-2021 menggunakan nomenklatur program yang sedikit berbeda karena penggabungan SKPD Kelurahan yang melebur dalam SKPD Kecamatan. Adapun rekapitulasi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang direncanakan periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
<b>PROGRAM PENUNJANG</b>																			
			01		Prog.Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	100%	90%	2.670.849.000	91%	2.654.666.000	92%	2.734.307.000	93%	2.816.334.000	94%	2.900.824.000	95%	13.776.980.000
				05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar (1 Tahun)	4 Jenis	24	594.634.000	24	612.473.000	24	630.847.000	24	649.772.000	24	669.265.000	120	3.156.991.000
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara perizinannya	7 Buah	31 Buah	15.000.000	31 Buah	15.450.000	31 Buah	15.914.000	31 Buah	16.391.000	31 Buah	16.883.000	155	79.638.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	24 Jenis	19 Jenis	54.766.000	19 Jenis	56.408.000	19 Jenis	58.101.000	19 Jenis	59.844.000	19 Jenis	61.639.000	95	290.758.000
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	72 Jenis	72 Jenis	188.288.000	72 Jenis	193.937.000	72 Jenis	199.755.000	72 Jenis	205.747.000	72 Jenis	211.920.000	360	999.647.000
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Surat yang Tercetak (1 Tahun)	2 jenis	2 Jenis	54.441.000	2 Jenis	56.074.000	2 Jenis	57.756.000	2 Jenis	59.489.000	2 Jenis	61.274.000	10	289.034.000
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik	9 Jenis	8 jenis	28.110.000	8 jenis	28.953.000	8 jenis	29.822.000	8 jenis	30.717.000	8 jenis	31.638.000	40	149.240.000
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar	3 jenis	-	-	3	10.125.000	3	10.428.000	3	10.741.000	3	11.063.000	15	42.357.000
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Makanan/Minuman	145 Pegawai	145 Oran g	143.394.000	145 Oran g	147.696.000	145 Oran g	152.127.000	145 Oran g	156.690.000	145 Oran g	161.391.000	725	761.298.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5			
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							Pegawai (1 Tahun)													
					18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	15 Paket	385.000.000	15 Paket	396.550.000	15 Paket	408.447.000	15 Paket	420.700.000	15 Paket	433.321.000	75	2.044.018.000
					19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran (13 Bulan) belum	55 Orang	55 Orang	1.207.216.000	55 Orang	1.137.000.000	55 Orang	1.171.110.000	55 Orang	1.206.243.000	55 Orang	1.242.430.000	275	5.963.999.000
			02	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>509.780.000</b>	<b>91%</b>	<b>1.137.029.000</b>	<b>92%</b>	<b>1.171.140.000</b>	<b>93%</b>	<b>1.269.991.000</b>	<b>94%</b>	<b>1.299.170.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.419.261.000</b>
					05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang mendukung tugas	2	2 Buah	35.500.000	2 Unit	36.565.000	2 Unit	37.662.000	2 Unit	38.792.000	2 Unit	39.955.000	10	188.474.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					kedinasan														
				07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	-	-	2 Jenis	10.700.000	2 Jenis	11.021.000	2 Jenis	11.352.000	2 Jenis	11.692.000	10	44.765.000
				09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor	23 Jenis	-	-	23 Unit	529.256.000	23 Unit	545.133.000	23 Unit	561.488.000	23 Unit	563.172.000	115	2.199.049.000
				22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Bahan Pemeliharaan Gedung	1 Paket	-	-	1 Paket	24.000.000	1 Paket	24.720.000	1 Paket	89.177.000	1 Paket	98.094.000	5	235.991.000
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	31	31 Unit	110.000.000	31 Unit	113.300.000	31 Unit	116.699.000	31 Unit	120.200.000	31 Unit	123.806.000	155	584.005.000
				28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan	10 Jenis	10	134.780.000	10 Jenis	138.823.000	10 Jenis	142.988.000	10 Jenis	147.278.000	10 Jenis	151.696.000	50	715.565.000



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Peralatan Gedung Kantor														
				55	Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	2	2	229.500.000	2	236.385.000	2	243.477.000	2	250.781.000	2	258.304.000	10	1.218.447.000
				141	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Jumlah Rumah Dinas	1 Unit	-	-	1 Unit	48.000.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	50.923.000	1 Unit	52.451.000	5	200.814.000
			03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>74.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>76.375.000</b>	<b>100%</b>	<b>78.666.000</b>	<b>100%</b>	<b>81.026.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.217.000</b>
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas	77 Stel	-	-	77 Stel	40.900.000	77 Stel	42.127.000	77 Stel	43.391.000	77 Stel	44.693.000	385	171.111.000
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapat	77 Stel	-	-	77 Stel	33.250.000	77 Stel	34.248.000	77 Stel	35.275.000	77 Stel	36.333.000	385	139.106.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					pakaian dinas														
			05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100%	100%	-	100%	18.050.000	100%	18.592.000	100%	19.149.000	100%	19.724.000	100%	75.515.000
				07	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Jumlah Kegiatan Senam (1 Tahun)	10 Kali	-	-	10 Kali	18.050.000	10 Kali	18.592.000	10 Kali	19.149.000	10 Kali	19.724.000	50	75.515.000
			29		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja inspektoral	100%	92%	-	94%	10.000.000	96%	20.000.000	98%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000
					Penyusunan LKjIP	Jumlah Dokumen LKjIP	5	1	-	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	30.000.000
					Penyusunan Evaluasi Renja & Renstra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	2	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					kinerja output & kinerja keuangan														
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan evaluasi renstra OPD														
<b>PROGRAM PRIORITAS</b>																			
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM		2 2	Prog. Penanggulangan Kemiskinan terpadu	Persentase PMKS Miskin Yang Terlayani	100%	-	-	90%	56.704.000	91%	58.405.000	92%	60.158.000	93%	61.963.000	94%	237.230.000
		persentase keluhan yang ditindaklanjuti		2 2	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima program Penanggulangan Kemiskinan	Pemutakhiran Data PMKS	-	-	-	1 buah	56.704.000	2 buah	58.405.000	2 buah	60.158.000	2 Buah	61.963.000	7 buah	237.230.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			025		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	70%	3.768.275.000	75%	4.478.766.000	80%	4.613.119.000	85%	4.751.504.000	90%	4.894.315.000	90%	22.505.979.000
					18 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Batu Ampar	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	70	70 Orang	630.000.000	70 Orang	648.900.000	70 Orang	668.367.000	70 Orang	688.412.000	70 Orang	709.064.000	350	3.344.743.000
					19 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	52	52 Orang	468.000.000	52 Orang	482.040.000	52 Orang	496.500.000	52 Orang	511.395.000	52 Orang	527.000.000	260	2.484.935.000
					20 Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Jumlah RT yang mendapat bantuan	61	61 Orang	549.000.000	61 Orang	565.470.000	61 Orang	582.434.000	61 Orang	599.907.000	61 Orang	617.905.000	305	2.914.716.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				2 1	Kelurahan Karang Joang  Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Muara Rapak	operasional pertahun (RT) Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	86	86 Orang	774.000.000	86 Orang	797.220.000	86 Orang	821.137.000	86 Orang	845.770.000	86 Orang	871.140.000	430	4.109.267.000
				2 2	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Graha Indah	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	66	66 Orang	594.000.000	66 Orang	611.820.000	66 Orang	630.175.000	66 Orang	649.080.000	66 Orang	668.553.000	330	3.153.628.000
				2 3	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	30	30 Orang	270.000.000	30 Orang	278.100.000	30 Orang	286.443.000	30 Orang	295.040.000	30 Orang	303.900.000	150	1.433.483.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				35	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan (1 Tahun)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	115.580.000	4 Kegiatan	115.580.000	4 Kegiatan	119.048.000	4 Kegiatan	122.611.000	4 Kegiatan	126.289.000	20	599.108.000
				36	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	Jumlah kegiatan (1 Tahun)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	132.980.000	2 Kegiatan	132.980.000	2 Kegiatan	136.969.000	2 Kegiatan	141.079.000	2 Kegiatan	145.311.000	10	689.319.000
				37	Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina (1 Tahun)	-	-	-	6 Kelurahan	56.890.000	6 Kelurahan	58.596.000	6 Kelurahan	60.355.000	6 Kelurahan	62.165.000	24	238.006.000
				38	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	IKM	2500 Lembar	-	-	2500 Lembar	61.100.000	2500 Lembar	62.933.000	2500 Lembar	64.820.000	2500 Lembar	66.765.000	1000	255.618.000
				39	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah	Jumlah kegiatan (1 Tahun)	24 Kali	-	-	24 Kali	199.290.000	24 Kali	205.270.000	24 Kali	211.430.000	24 Kali	217.773.000	96	833.763.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						Kecamatan													
				40	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah IMTN yang terbit (1 Tahun)	1.400 Dokumen	-	-	1.400 Dokumen	68.262.000	1.400 Dokumen	70.300.000	1.400 Dokumen	72.410.000	1.400 Dokumen	74.580.000	5600	285.552.000
				41	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Jumlah RT yang dibina	200 Kelompok	200 Kelompok	234.715.000	200 Kelompok	234.715.000	200 Kelompok	241.757.000	200 Kelompok	249.010.000	200 Kelompok	256.480.000	1000	1.216.677.000
				44	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan	210 Orang	-	-	210 Orang	226.399.000	210 Orang	233.190.000	210 Orang	240.185.000	210 Orang	247.390.000	840	947.164.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			027		Prog. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase kepatuhan izin UMK	90%	91%	-	93%	24.750.000	94%	25.550.000	95%	26.626.000	96%	27.425.000	97%	104.351.000
				13	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Jumlah Izin yang diterbitkan ( 1Tahun)	60 Izin	-	-	60 Izin	24.750.000	60 Izin	25.550.000	60 Izin	26.626.000	60 Izin	27.425.000	240	104.351.000
			023		Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penurunan angka kemiskinan	4 Kegiatan	-	-	5%	54.950.000	6%	56.598.000	7%	58.296.000	8%	60.045.000	36%	229.889.000
				01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi ( 1 Tahun)	4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	54.950.000	4 Kegiatan	56.598.000	4 Kegiatan	58.296.000	4 Kegiatan	60.045.000	20	229.889.000
			15		Prog. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan	1 Kegiatan	-	-	90%	26.832.000	91%	27.636.000	92%	28.465.000	93%	29.319.000	94%	112.252.000



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					terhadap anak dan perempuan														
				08	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Terlaksana pembangunan Kecamatan Layak Anak	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	26.832.000	1 Kegiatan	27.636.000	1 Kegiatan	28.465.000	1 Kegiatan	29.319.000	5	112.252.000
			02	44	Prog. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitas pembinaan	100%	-	-	93%	124.350.000	94%	128.010.000	95%	131.850.000	96%	135.800.000	97%	520.010.000
				01	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan	4	-	-	4 kali	124.350.000	4	128.010.000	4	131.850.000	4	135.800.000	16	520.010.000
			02	15	Program Pengembangan Data dan	Persentase pemenuh	10 Dokumen	-	-	91%	25.155.000	92%	26.000.000	93%	26.780.000	94%	27.600.000	94%	105.535.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Informasi	an data Kecamatan														
				06	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	10 Dokumen	-	-	3 Dokumen	25.155.000	3 Dokumen	26.000.000	3 Dokumen	26.780.000	3 Dokumen	27.600.000	12	105.535.000
			18		Prog. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase posyandu yang mandiri	100%	-	-	100%	145.330.000	100%	149.690.000	100%	154.181.000	100%	158.806.000	100%	608.007.000
				11	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan	8	-	-	8	145.330.000	8	149.690.000	8	154.181.000	8	158.806.000	32	608.007.000
			17		Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Nilai potensi swadaya masyarakat	100%	-	-	90%	14.300.000	91%	14.729.000	92%	15.171.000	93%	15.626.000	93%	59.826.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				31	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	Jumlah Penyuluhan	1	-	-	1	14.300.000	1	14.729.000	1	15.171.000	1	15.626.000	4	59.826.000
			02	15	Prog. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Persentase Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	50%	-	-	50%	34.425.000	51%	35.460.000	52%	36.524.000	53%	37.611.000	53%	144.020.000
				06	Kecamatan Bersinar (Bersih Dari Narkoba)	Jumlah kegiatan penyuluhan (1 Tahun)	2	-	-	2	34.425.000	2	35.460.000	2	36.524.000	2	37.611.000	8	144.020.000
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman	Nilai swadana masyarakat		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pembangunan daerah	100%	90%	62.530.600	91%	64.405.000	92%	81.335.000	93%	83.322.000	94%	105.369.000	95%	396.961.600

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
dan ketertiban	dan ketertiban																		
				17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	14	14	15.000.000	15	15.450.000	16	15.913.000	17	16.390.000	18	16.881.000	98	79.634.000
				37	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Batu Ampar	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	7	7	9.150.000	7	9.424.000	7	9.707.000	7	9.998.000	7	10.297.000	35	48.576.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				38	Penyelenggaraa n Musrenbang Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )	5	5	7.401.000	5	7.622.000	5	7.850.000	5	8.086.000	5	8.328.000	25	39.287.000
				39	Penyelenggaraa n Musrenbang Kelurahan Karang Joang	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )	5	5	8.540.000	5	8.796.000	5	9.059.000	5	9.330.000	5	9.609.000	25	45.334.000
				40	Penyelenggaraa n Musrenbang Kelurahan Muara Rapak	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun	5	5	7.250.000	5	7.468.000	5	7.692.000	5	7.922.000	5	8.160.000	25	38.492.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					(usulan)															
				41	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	5	5	7.939.600	5	8.177.000	5	8.422.000	5	8.674.000	5	8.934.000	25	42.146.600	
				42	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Graha Indah	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	6	6	7.250.000	6	7.468.000	6	7.692.000	6	7.922.000	6	8.160.000	30	38.492.000	
				57	Penyusunan Renstra Kecamatan	Jumlah Dokumen	1		-	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	
				21	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan	Jumlah Dokumen	1		1	-	1	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	45.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Perangkat Daerah														
			024		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase prestasi yang diraih	100%	90%	416.045.000	91%	428.524.000	92%	441.379.000	93%	517.316.000	94%	544.875.000	95%	2.348.139.000
				18	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (kegiatan)	4	4	16.375.000	4	16.866.000	4	17.372.000	4	20.000.000	4	21.250.000	20	91.863.000
				19	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (kegiatan)	4	4	16.375.000	4	16.866.000	4	17.372.000	4	20.000.000	4	21.250.000	20	91.863.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				20	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Joang	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (kegiatan)	4	4	16.375.000	4	16.866.000	4	17.372.000	4	20.000.000	4	21.250.000	20	91.863.000
				21	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (kegiatan)	4	4	16.375.000	4	16.866.000	4	17.372.000	4	20.000.000	4	21.250.000	20	91.863.000
				22	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan	4	4	16.375.000	4	16.866.000	4	17.372.000	4	20.000.000	4	21.250.000	20	91.863.000



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					Samarinda Baru	ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)													
				23	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Graha Indah	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	4	4	16.375.000	4	16.866.000	4	17.372.000	4	20.000.000	4	21.250.000	20	91.863.000
				38	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat (PKK) Tk. Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan dan Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat	6 Kelurahan	6	17.795.000	6	18.328.000	6	18.877.000	6	69.500.000	6	79.725.000	30	204.225.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					at (kegiatan)													
				58	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	5 paket	5 paket 50.000.000	5 paket 51.500.000	5 paket 53.045.000	5 paket 54.636.000	5 paket 56.275.000	25 paket 265.456.000					
				59	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	5 paket	5 paket 50.000.000	5 paket 51.500.000	5 paket 53.045.000	5 paket 54.636.000	5 paket 56.275.000	25 paket 265.456.000					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				60	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Joang	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	5 paket	5 paket 50.000.000	5 paket 51.500.000	5 paket 53.045.000	5 paket 54.636.000	5 paket 56.275.000	25 paket 265.456.000					
				61	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	5 paket	5 paket 50.000.000	5 paket 51.500.000	5 paket 53.045.000	5 paket 54.636.000	5 paket 56.275.000	25 paket 265.456.000					
				62	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan	5 paket	5 paket 50.000.000	5 paket 51.500.000	5 paket 53.045.000	5 paket 54.636.000	5 paket 56.275.000	25 paket 265.456.000					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
									TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						Gunung Samarinda Baru	bangunan lingkungan terbangun													
					63	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	5 paket	5 paket 50.000.000	5 paket 51.500.000	5 paket 53.045.000	5 paket 54.636.000	5 paket 56.275.000	25 paket 265.456.000						
			02	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan tingkat Kecamatan dan Kota	100%	90% 764.926.000	91% 73.450.000	92% 75.653.000	93% 77.923.000	94% 80.260.000	95% 1.072.212.000						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				2 3	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Utara Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	Jumlah Cabang Lomba MTQ	22	22	764.926.000	22	73.450.000	22	75.653.000	22	77.923.000	22	80.260.000	110	1.072.212.000
								8.192.405.600		9.445.836.000		9.753.978.000		10.172.256.000		10.499.758.000		44.086.384.600	



## BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan dan sasaran strategis****Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien**

Dengan sasaran strategis : **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

**Tujuan 2 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.**

Dengan sasaran strategis : **Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.**

Tabel 6.1

**Matriks hubungan tujuan strategis, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Kecamatan Balikpapan Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat	1. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan	1. Prog. Penanggulangan Kemiskinan terpadu	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima program Penanggulangan Kemiskinan
			Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait	2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;		2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
				3. Pengembangan data base Kecamatan.	2. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Samarinda	
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Membangun sistem layanan pengaduan	Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat.	3. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Joang	4. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Muara Rapak
		Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan.				

						5. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Graha Indah
						6. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Samarinda Baru
						7. Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
						8. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
						9. Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
						10. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
						11. Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
						12. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)
						13. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ( RT )
						14. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat
					Prog. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)



INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

					Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
					Prog. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak
					Prog. Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
					Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Profil Kecamatan
					Prog. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
					Prog. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
					Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
					Prog. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Persentase Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Memperkuat fasilitas kerjasama dengan lembaga/ormas	Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Batu Ampar
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Samarinda
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Joang
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Muara Rapak
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Samarinda Baru
						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Graha Indah
						Penyusunan Renstra Kecamatan
					Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Batu Ampar
						Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Samarinda
						Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Joang
						Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Muara Rapak
						Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Samarinda Baru

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

						Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Graha Indah
						valuasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kecamatan
						Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
						Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Samarinda
						Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Joang
						Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak
						Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Samarinda Baru
						Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Utara Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota

Tabel 6.2

## Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase PMKS Miskin Yang Terlayani	100%	0%	90%	91%	92%	93%	93%
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3.	Persentase kepatuhan izin UMK	90%	91%	93%	94%	95%	96%	96%
4.	Penurunan angka kemiskinan	4%	0%	5%	6%	7%	8%	8%
5.	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	100%	0%	93%	94%	95%	96%	96%
6.	Persentase pemenuhan data Kecamatan	100%	0%	91%	92%	93%	94%	94%
7.	Persentase posyandu yang mandiri	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Nilai potensi swadaya masyarakat	100%	0%	90%	91%	92%	93%	93%
9.	Persentase Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	50%	0%	50%	51%	52%	53%	53%
10.	Persentase Pembangunan daerah	100%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
11.	Persentase prestasi yang diraih	100%	90%	91%	92%	93%	94%	94%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Persentase Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan tingkat Kecamatan dan Kota	100%	90%	91%	92%	93%	94%	94%